

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Baldwin, Robert, Martin Cave, dan Martin Lodge. *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. Oxford University Press, 2012.
- Black, Julia. *Risk and Regulatory Policy: Improving the Governance of Risk*. OECD, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Fendri, Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*. RajaGrafindo Persada, 2023.
- Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Perizinan*. Penerbit Yuridika, 1993.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Alfabeta, 2017.
- Manan, Bagir. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Jakarta, 1995.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2004
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press, 2006.
- Salam, Dharma Setyawan. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Djembatan, 2004.
- Soemantri, Sri. *Otonomi Daerah*. Remaja Rosdakarya, 2014.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, 2010.

Wasistiono, Sadu. *Sistem Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Bahan Kursus Reguler ke-23 Staf Umum dan Komando TNI-AD Tahun Akademik 1999/2000*. SESKOAD, 1997.

Wibowo, Richo Andi, ed. *Hukum Administrasi Negara: Konsep, Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus*. Rajawali Press, 2024.

### **Jurnal**

Al'afghani , Mohamad Mova dan Bisariyadi. “*Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 1, 2021, <https://doi.org/10.31078/jk1814>.

Black, Julia dan Robert Baldwin, “*Really Responsive Risk-Based Regulation*”, Law & Policy, Vol. 32, 2010, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00318.x>.

Firmansyah, Adithya Tri, Ema Sarila Sinaga, dan Fenia Aurully Aisyah, “*Hilangnya Sendi Demokrasi dan Otonomi Daerah Melalui Korporatokrasi RUU Omnibus Law*”, Widya Yuridika, Vol. 3, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1492>.

Mudiparwanto, Wahyu Adi dan Ade Gunawan, “*Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)*”, Diversi Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, 2021, <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1328>.

Pitono, Andi, “*Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*”, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 3, 2012.

Sufianto, Dadang, “*Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia*”, Jurnal Academia Praja, Vol. 3, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>.

## **Makalah**

Manan, Bagir, “Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945”, Jakarta, 1995.

## **Hasil Penelitian**

Zehan, Amarsyah, 2022, *Tinjauan Yuridis Prosedur Perizinan Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Semarang*, Skripsi, Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

## **Internet**

Baktora, Muhammad Ilham dan Hiskia Andika Weadcaksana. “Gerebek Miras Ilegal di Jogja, Polisi Amankan Puluhan Botol dan Seorang Wanita”, *Suara Jogja*, 3 Juni 2025.  
<https://jogja.suara.com/read/2025/06/03/155724/gerebek-miras-ilegal-di-jogja-polisi-amankan-puluhan-botol-dan-seorang-wanita>.

BPK Daerah Istimewa Yogyakarta. “Pembahasan RAPBN – Anggaran TKD Naik Rp43 Triliun”, *BPK Daerah Istimewa Yogyakarta*, 7 Oktober 2025,  
<https://yogyakarta.bpk.go.id/pembahasan-rapbn-anggaran-tkd-naik-rp43-triliun/>.

CNN Indonesia. “Duduk Perkara Yogyakarta Darurat Miras Hingga Sultan HB X Bertitah”, *CNN Indonesia*, 31 Oktober 2024.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241031132902-12-1161567/duduk-perkara-yogyakarta-darurat-miras-hingga-sultan-hb-x-bertitah>.

CNN Indonesia. “DPR soal Dana TKD 2026 Dipangkas: Buat MBG hingga Sekolah Rakyat”, *CNN Indonesia*, 11 Oktober 2025,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251011145111-32-1283488/dpr-soal-dana-tkd-2026-dipangkas-buat-mbg-hingga-sekolah-rakyat>.

Damayanti, Resti. “Muhammadiyah Temukan 80 Toko Miras di DIY, 70 Persen Ada di Sleman”, *Kumparan*, 21 September 2024.

<https://kumparan.com/pandangan-jogja/muhammadiyah-temukan-80-toko-miras-di-diy-70-persen-ada-di-sleman-23ZH8HRzVvr/full>.

Fatimah, Siti. “Ribuan Santri Demo di Polda DIY Serukan Jogja Anti Miras”, *Tirto.id*, 29 Oktober 2024.

<https://tirto.id/ribuan-santri-demo-di-polda-diy-serukan-jogja-anti-miras-g5cy>.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Survei Kesehatan Indonesia dalam Angka,” *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2023,

[https://drive.google.com/file/d/1rjNDG\\_f8xG6-Y9wmhJUnXhJ-vUFevVJC/view](https://drive.google.com/file/d/1rjNDG_f8xG6-Y9wmhJUnXhJ-vUFevVJC/view).

Leon, Yosef. “Gelar Demo soal Peredaran Miras, FUI DIY: Pemerintah Tak Bertindak, Kami yang Akan Bergerak”, *Harian Jogja*, 25 Oktober 2024.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/10/25/510/1192771/gelar-demo-soal-peredaran-miras-fui-diy-pemerintah-tak-bertindak-kami-yang-akan-bergerak>.

Leon, Yosef. “Cegah Saling Lempar Penanganan Miras, Pemda DIY Ingatkan Terkait Kewenangan Pengawasan dan Perizinan”, *Harian Jogja*, 23 Oktober 2024.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/10/23/510/1192501>.

Lestari, Ade Hapsari. “Setahun Prabowo–Gibran: Fokus Perkuat Investasi dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen”, *Metro TV News*, 18 Oktober 2024.

<https://www.metrotvnews.com/read/N4EC4eYp-setahun-prabowo-gibran-fokus-perkuat-investasi-dan-dorong-pertumbuhan-ekonomi-8-persen>.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, “Satu Data UMKM Kabupaten Sleman,” *Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman*,

<https://dataumkm.slemankab.go.id/newportal2>.

Pramono, Andreas Yuda, “Ada 21 Penjual Resmi Minuman Beralkohol di Sleman, Tersebar di Hotel dan Restoran”, *Harian Jogja*, 23 Mei 2025.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/05/23/512/1214465>.

Pramono, Andreas Yuda, “Diluncurkan Sebulan Lalu, Laporan Minol Sleman Terima Sejumlah Aduan”, *Harian Jogja*, 21 Juni 2025.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/06/21/512/1217833>.

Pramono, Andreas Yuda, “Puluhan Pelaku Usaha di Sleman Tak Kantongi Izin Dagang Miras”, *Harian Jogja*, 12 Januari 2025.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/01/12/512/1200696>.

Pramono, Andreas Yuda, “Sempat Ditutup, 10 Outlet Miras Ilegal di Sleman Buka Lagi”, *Harian Jogja*, 18 Maret 2025.

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/03/18/512/1207554>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 10).

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 8).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap

Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4).